

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Haryadi, Dwi. 2013. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Lima.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Masruchin Ruba'I, dkk. 2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Banyumedia Publish.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pambayun, Ellys Lestari. 2010. *Birahi Maya Mengintip Perempuan di Cyberporn*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Siregar, Alimuddin. 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulianta, Fery. 2010. *Cyberporn – Bisnis atau Kriminal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Wetboek van Strafrecht*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

C. JURNAL HUKUM

Bambang Sudjito et al. *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*. 2016. Wacana Journal of Social and Humanity Studies. Vol. 19 (2), hlm 66-72. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>

Dodo Zaenal Abidin. *Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*. 2015. Jurnal Ilmiah Media Processor. Vol. 10 (2), hlm. 509-516.

Eka Nugraha Putra. *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*. 2015. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 6 (1), hlm 1-12. DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v6i1.680>

Erniwati. *Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*. 2015. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan. Vol. 25 (2), hlm 102-112.

Gusti Heliana Safitri dan Hendy Indra Pratama. 2021. *Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Vol. 2 (2), hlm 336-351. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.37>

Kirsty Philips et al. 2022. *Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies*. Forensic Sciences. Vol. 2 (2), hlm 379-398. DOI: <https://doi.org/10.3390/forensicsci2020028>

Suwari Akhmaddhian. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*. Jurnal Unifikasi, Vol. 3, No. 1, hlm 1-35. DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>

Tony Yuri Rahmanto. 2019. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Vol. 19 (1), hlm 31-51. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>

D. INTERNET

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022, Survei Profil Internet Indonesia 2022, <https://apji.or.id/survei>, diakses pada tanggal 24 September 2022

Cindy Mutia Annur, 2016, *Perjudian, Konten Internet Negatif Paling Banyak Diadukan Warga*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/19/perjudian-konten-internet-negatif-paling-banyak-diadukan-warga>, diakses pada tanggal 24 September 2022.

Jimly Asshiddiqie, 2016, *Makalah Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 24 September 2022.

E. LAIN-LAIN

Wawancara dengan Bapak AKP Fatah Meilana, S.I.K., M.H., dan Brigadir Hastama Yudiswira P, S.H., M.H., tanggal 11 November 2022.

Wawancara dengan Brigadir Hastama Yudiswira P, S.H., M.H., selaku Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus dan Bripda Mahendra Bogy Prawira selaku Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus, tanggal 8 Februari 2023.